



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK MATERI SIDANG PARIPURNA (KHUSUS)
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN
TENTANG PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RAPBN 2006**

Gedung Nusantara, 23 Agustus 2005

LAGU INDONESIA RAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

Sidang Dewan Perwakilan Daerah dan hadirin yang kami hormati,

Penyelenggaraan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden tentang Pembangunan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 kita laksanakan pada saat bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ke-60. Untuk itu, sebelum memulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta sejenak mengenang jasa para Pahlawan Kusuma Bangsa; serta berdoa, semoga arwah para pahlawan mendapatkan tempat yang layak di sisi-Nya. Kita mohon pula kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang begitu berat, semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* meridhoi segala upaya kita dalam mengemban amanah rakyat, membangun bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. **MENGHENINGKAN CIPTA, MULAI!**

LAGU MENGHENINGKAN CIPTA

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastyastu

Yang Terhormat:

- Saudara Presiden Republik Indonesia;
- Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Saudara-saudara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan Pimpinan Lembaga Negara;
- Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

- Yang Mulia para Duta Besar/Kepala Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional;
- Para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, hadirin, serta undangan kami yang berbahagia.

Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir ... orang Anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD kuorum telah tercapai.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim*, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden tentang Pembangunan Daerah dalam kaitannya dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 ini kami **BUKA**, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Para hadirin yang kami hormati,

Sebagai insan yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Penciptanya, izinkan kami memulai pengantar ini dengan mengajak hadirin sekalian untuk menghaturkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa karena atas taufiq dan hidayah-Nya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna DPD ini dalam keadaan sehat wal afiat. Seiring dengan itu, sudah seharusnya pula kita bersyukur kepada-Nya, bahwa bangsa kita tetap memegang teguh janji menjadi sebuah bangsa yang bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi.

Sebentar lagi kita akan mendengarkan Pidato Presiden tentang Pembangunan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 yang merupakan peristiwa kenegaraan bersejarah, karena untuk pertama kalinya diselenggarakan Sidang Paripurna antara DPD dan Presiden. Berlangsungnya sidang ini menjadi wujud kesepakatan antara DPD dan Presiden untuk menorehkan lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan, yakni mengembangkan sebuah konvensi dan tradisi politik kelembagaan negara dalam sistem demokrasi kita.

Untuk itu, atas nama Pimpinan dan Anggota DPD, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Kesediaan Saudara Presiden memenuhi undangan ini merupakan salah satu bukti kearifan dan sikap kenegarawanan beliau.

Menjadi harapan dan dambaan kami, hubungan yang tengah dibangun antara DPD dengan Presiden mengarah kepada pola hubungan yang sinergis, konstruktif, dan demokratis. Kami meyakini hal itu akan dapat diwujudkan mengingat antara anggota DPD dan Presiden mempunyai persamaan yang sangat penting, yakni sama-sama dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu 2004 yang lalu.

Harapan yang sama juga kami sampaikan kepada Pimpinan dan anggota DPR untuk melangkah ke depan secara bersama-sama guna merumuskan pola hubungan antara DPD dan DPR yang saling membawa manfaat dan kemaslahatan bersama.

Mengingat substansi Pidato Presiden menyangkut pembangunan daerah, maka pada Sidang Paripurna DPD ini hadir para Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kehadiran para pemangku pembangunan di daerah ini terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran para pimpinan pemerintahan di daerah itu, selain untuk mendengarkan secara langsung penjelasan pemerintah mengenai rencana pembangunan di daerah, juga diharapkan akan dapat menyinergikan kepentingan seluruh *stakeholders* baik pusat maupun daerah melalui kebijakan pembangunan yang tepat dan menyeluruh.

Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPD mengucapkan selamat kepada Para Gubernur/Bupati/Walikota yang baru saja terpilih dalam Pilkada yang lalu.

Di samping para pimpinan daerah, kami juga mengundang organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan partai-partai politik serta representasi dari DPR RI, yaitu mereka yang berkepentingan dengan perkembangan demokrasi, di samping tentunya berkepentingan pula terhadap pembangunan daerah, sehingga secara bersama-sama, dengan mengambil manfaat dari pidato Presiden, seluruh kekuatan bangsa dapat mendukung upaya peningkatan kemajuan daerah sebagai bagian esensial dari kemajuan nasional.

Ingin pula kami sampaikan sebuah catatan bahwa Sidang Paripurna DPD ini secara khusus didukung oleh sebuah orkes simfoni, yaitu Twilite Orchestra yang hadir di tengah-tengah kita semua karena didorong oleh semangat

kebangsaan, dalam kebhinneka tunggal ika-an melalui persembahan lagu-lagu perjuangan dan daerah, sehingga diharapkan akan membawakan suasana patriotik sekaligus dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-60. Kepada Pimpinan Twilite Orchestra Saudara Adi MS beserta seluruh anggotanya, kami mohon untuk berdiri.

Dalam Sidang Paripurna DPD ini, kami telah mengundang para hadirin untuk mengenakan pakaian batik yang merupakan pakaian nasional yang coraknya sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan dan karakter budaya di daerah-daerah. Dengan menggunakan pakaian batik selain akan terasa lebih nyaman beraktivitas di negara kita yang beriklim tropis ini, dan sejalan dengan imbauan Presiden dalam menghemat energi serta pencaanangan tahun 2005/2006 sebagai Tahun Festival Seni dan Budaya, juga merupakan sebuah ungkapan rasa kebangsaan serta kebanggaan kita menggunakan produksi khas hasil bangsa sendiri.

Saudara Presiden, Wakil Presiden, Sidang Dewan, dan Hadirin yang terhormat,

- Salah satu perubahan penting dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembentukan lembaga negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Pembentukan DPD adalah senafas dengan semangat otonomi daerah, yaitu perlu adanya lembaga negara yang dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah.
- Keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional, serta di lain pihak kebijakan-kebijakan nasional senantiasa sesuai dengan kepentingan daerah dan berpihak pada kepentingan rakyat di seluruh tanah air.
- Posisi DPD dalam kerangka otonomi daerah dapat dilihat dari fungsi yang diamanatkan konstitusi pada lembaga ini. Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan DPD dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Serta DPD bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan berbagai Undang-Undang tersebut.
- Sidang Paripurna DPD hari ini adalah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Hadirin yang terhormat,

- Sejalan dengan pandangan kemanusiaan dalam hakikat pembangunan bangsa, maka pembangunan nasional bertumpu pada peran rakyat dan diselenggarakan secara merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.
- Dalam perspektif ini kami ingin menyatakan sedikit mengenai masalah kemiskinan yang menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya mengatasinya. Beberapa kejadian belakangan ini seperti berjangkitnya kembali penyakit polio, busung lapar dan gizi buruk yang menimpa cukup banyak penduduk yang tersebar di hampir seluruh wilayah tanah air, menunjukkan gejala kemiskinan yang parah, dan negara membutuhkan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral, dan berkelanjutan.
- Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada penduduk miskin untuk berperan dalam proses produksi dan kepemilikan aset produksi. Yang diperlukan adalah menghilangkan penyebab struktural kemiskinan atau perangkap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi kemiskinan diperlukan kebijakan publik, yang langsung ditujukan untuk memecahkan perangkap kemiskinan itu.
- Pemihakan untuk pemberantasan kemiskinan memerlukan intervensi pemerintah yang sungguh-sungguh. Meskipun ekonomi harus makin diarahkan kepada ekonomi pasar sesuai kecenderungan global, dan untuk itu diperlukan apa yang disebut *a level playing field*, namun negara harus menjamin persaingan berjalan seimbang. Kehadiran negara pun perlu tegak di wilayah-wilayah miskin dalam memelopori terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru.

- Pengalaman pembangunan selama ini, baik keberhasilannya atau kegagalannya patut menjadi modal yang berharga bagi pembangunan pada tahap selanjutnya. Termasuk pengalaman dalam membangun wilayah tertinggal dan daerah perbatasan. Dari berbagai pengalaman itu dapat ditarik banyak pelajaran, di antaranya adalah bahwa pembangunan di wilayah tertinggal termasuk daerah perbatasan penuh dengan dilema. Penentuan pilihan tidak selalu mudah. Proses pengambilan keputusan, termasuk penetapan-penetapan prioritas harus senantiasa memperhitungkan adanya *trade-off* antara satu pilihan (*option*) dan pilihan lainnya. Pilihan-pilihan yang dilematis itu perlu sungguh-sungguh diupayakan pemahamannya untuk dapat mencari pemecahan yang tepat. Secara khusus, para Anggota DPD dari Provinsi-provinsi di wilayah perbatasan mengharapkan ada koordinasi dan kebijakan khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah perbatasan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dan keamanan.
- Dimensi pembangunan daerah lainnya adalah pembangunan pedesaan dan perkotaan. Kesenjangan pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan selain disebabkan oleh kemiskinan struktural seperti yang telah disebutkan sebelumnya, juga karena kesenjangan akses terhadap sumber-sumber daya ekonomi, termasuk kurangnya sarana prasarana perhubungan yang menghubungkan pedesaan dengan daerah yang lebih maju; serta informasi.
- Dalam beberapa kunjungan kerja ke daerah, para anggota DPD, mendapati kenyataan semakin terdesaknya usaha-usaha di sektor tradisional oleh jaringan-jaringan berskala besar yang masuk ke wilayah di luar perkotaan, yang pada akhirnya akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak seimbang di wilayah pedesaan. Maka wajar, bahkan sudah seyogyanyalah apabila pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan publik yang berpihak kepada ekonomi rakyat agar masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan kesempatan yang adil untuk meningkatkan pendapatan dan membangun kemampuan untuk mengembangkan diri. Revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan hanya bisa berhasil bila disertai langkah-langkah mengatasi penyebab kemiskinan struktural yang melanda para petani, buruh tani, dan nelayan kita.
- Dikotomi desa-kota dalam konteks pembangunan nasional ini perlu diatasi secara konseptual, agar dalam jangka panjang tidak mengganggu keserasian pembangunan dalam rangka 7 (tujuh) prioritas pembangunan seperti yang diuraikan Saudara Presiden dalam pidato di depan DPR 16 Agustus yang lalu. Keserasian pembangunan ini merupakan prasyarat bagi perwujudan cita-cita keadilan sosial bangsa Indonesia.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Hadirin yang terhormat,

- Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah tentu kita sepakat bahwa otonomi daerah tidaklah sekedar proses administrasi politik yang berupa pelimpahan wewenang pembangunan dan pemerintahan kepada pemerintah daerah, melainkan lebih merupakan proses pembangunan daerah tersendiri dengan segala rangkaian komitmen dan tanggung jawab yang mengiringinya. Dalam hal ini, kami dari DPD ingin mengemukakan unsur yang amat penting dalam upaya meningkatkan otonomi daerah, yaitu kemantapan kelembagaan, konsistensi peraturan, dan ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri, serta tersedianya informasi yang cukup.
- Kiranya pemerintah dapat mendorong peningkatan kreativitas yang mulai tumbuh di tingkat lokal melalui berbagai pengaturan di bidang pendanaan yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendanaan baru, termasuk dari masyarakat dalam kerangka kebijakan fiskal dan moneter, terutama untuk mendukung Pemerintah Daerah yang telah memiliki kinerja baik. Di samping itu, pemerintah juga perlu mendorong kesadaran dan kerja sama antardaerah, baik antar Pemerintah Daerah, maupun di antara berbagai potensi yang ada di masyarakat, sehingga daerah-daerah bisa bekerja sama dengan semangat saling melengkapi dan menguntungkan.

Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan Hadirin yang kami muliakan,

- Dalam Pidato Nota Keuangan tanggal 16 Agustus yang lalu, Presiden membahas berbagai masalah yang dihadapi bangsa dewasa ini, antara lain masalah energi. Berkaitan dengan kebijakan energi, di samping mengatasi berbagai dampak kenaikan harga minyak internasional kepada anggaran negara dan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, perlu kiranya ada usaha yang nyata dalam menciptakan atau mendorong penggunaan yang lebih besar dari energi alternatif yang bisa didapat secara lokal. Hal ini kami pandang penting mengingat daerah tidak hanya memerlukan diversifikasi energi serta perlu melaksanakan konservasi energi, namun juga desentralisasi pengadaan energi.

- Permasalahan lain yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah masalah pertanian. Penyelesaian masalah di bidang agraria dan pertanahan ini hendaknya diarahkan untuk menjamin bahwa masalah tanah tidak menjadi penghalang bagi pembangunan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa, tetapi juga menjamin hak dan rasa keadilan rakyat.
- Berbagai masalah yang kami uraikan di atas tentunya tidak bisa diatasi segera. Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah perlu menempatkan 3 (tiga) agenda pembangunan nasional seperti yang disampaikan oleh Saudara Presiden pada pidato tanggal 16 Agustus yang lalu dalam fokus berjangka menengah yang tidak lain adalah mengutamakan pendidikan yang merata serta bermutu bagi semua warga negara tanpa kecuali, pengarusutamaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pematangan kehidupan demokrasi. Kami menyambut baik ajakan Presiden bagi DPD sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan RPJM Nasional, dan DPD akan berupaya untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penyempurnaan RPJM Nasional tersebut.
- Pengarusutamaan pendidikan, tata pemerintahan yang baik serta pematangan kehidupan demokrasi akan memungkinkan penuntasan penyelesaian masalah-masalah yang kronis yang melanda bangsa ini, yaitu kemiskinan struktural, penyalahgunaan wewenang dan berbagai penyelewengan serta tindakan-tindakan koruptif, serta konflik vertikal maupun horisontal.
- Khusus yang menyangkut pengarusutamaan pendidikan, kiranya Pemerintah perlu terus berupaya menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan. Kita mempunyai pekerjaan rumah yang besar di bidang pendidikan, termasuk di dalamnya penyempurnaan kurikulum yang mengarah pada penyeimbangan dan penyerasian jumlah dan jenis program studi pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium, dan ketersediaan guru yang jumlah dan kualitasnya memadai. Dalam rangka ini kami sepakat dengan Saudara Presiden bahwa dalam pengadaan tenaga kependidikan, diprioritaskan guru bantu untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Hadirin yang terhormat,

- Sejak bulan Juni 2005 yang lalu kita telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di beberapa daerah. Pilkada langsung ini merupakan langkah progresif bagi upaya peningkatan kualitas berdemokrasi di tingkat lokal dan sebagai kerangka sistem yang andal untuk meningkatkan partisipasi publik, legitimasi politik, akuntabilitas pemerintahan, serta *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif daerah.
- Secara umum pilkada telah berlangsung dengan baik, aman dan lancar. Sebagian besar daerah telah menyelenggarakan dan menuntaskan proses pilkada tanpa banyak halangan. Namun di berbagai daerah telah timbul masalah, karena terjadinya pandangan yang berbeda secara tajam mengenai proses dan hasil pilkada. Kita menyadari pilkada ini memang sebuah pengalaman baru bagi kita, jadi jika di sana sini ada kelemahan tentunya wajar saja sebagai masukan untuk perbaikan dikemudian hari.
- Ke depan kita perlu meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang Pilkada untuk menutup celah-celah yang dapat mengurangi nilai-nilai Pilkada sebagai sebuah wujud demokrasi rakyat yang jujur dan adil. Selain itu, DPD mengharapkan agar dimungkinkan adanya calon di luar yang diajukan oleh partai politik, atau yang sering disebut sebagai calon independen. Pengaturan mengenai ini perlu ditinjau kembali karena di hampir semua negara yang menerapkan sistem demokrasi adanya calon independen Pimpinan Pemerintah dan lembaga legislatif di semua tingkatan dimungkinkan.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Hadirin yang terhormat,

- Beberapa waktu yang lalu, bangsa kita mengalami ujian yang mahaberat. Pada saat itu, belum lagi kita selesai mengatasi dampak musibah alam yang terjadi di Alor dan Nabire, sebagian wilayah barat negeri mengalami musibah bencana alam. Hari minggu pagi, 26 Desember 2004, yang seharusnya disambut dengan penuh keceriaan berubah menjadi kepedihan, yaitu terjadinya badai tsunami yang luar biasa besarnya mengguncang sembilan negara, dan terutama yang mengalami pukulan paling berat adalah Indonesia. Badai tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara sungguh membuat bangsa kita terguncang, sedih, terpukul, dan menderita. Namun, sungguh kita bersyukur menyaksikan kepedulian masyarakat Indonesia serta masyarakat

internasional terhadap penderitaan yang dialami masyarakat pesisir Aceh dan Pulau Nias. Bukan hanya dalam bentuk materi bantuan yang mereka berikan, tetapi juga dalam bentuk tenaga. Terhadap mereka yang bekerja untuk kepentingan kemanusiaan dan tanpa pamrih, sepantasnya kita sebut mereka pahlawan. Pasca bencana alam, kita dihadapkan pada persoalan bagaimana membangun kembali Aceh, Nias, dan daerah lain yang terkena musibah. Kita harus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan kegiatan-kegiatan yang teramat kompleks dan multi aspek yang memerlukan kepekaan, kecerdasan, dan kejujuran dalam pelaksanaannya.

- Kita juga acapkali harus menghadapi berbagai bencana buatan manusia, belakangan ini antara lain kebakaran hutan dan lahan yang melanda Sumatera dan Kalimantan. Berbagai musibah yang hampir terus menerus kita hadapi merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk mawas diri dan berupaya memperbaiki diri. Dalam kaitan ini, pengelolaan sumber daya alam, yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Kearifan dalam pengelolaan sumber daya alam bersama dengan pengelolaan sumber daya sosial bangsa kita, akan meniadakan potensi konflik dan memudahkan kita kembali ke sikap beradab, membangun solidaritas nasional yang tidak mempermasalahkan asal usul, suku, agama, ras, maupun golongan, serta senantiasa kompak dalam keadaan apapun sehingga bangsa kita akan senantiasa kukuh ketika menghadapi ancaman yang besar.

Sidang Dewan Perwakilan Daerah dan Hadirin yang berbahagia,

- Walaupun rangkaian bencana dan tantangan telah mempersatukan kita sebagai bangsa, namun kita tidak boleh lengah terhadap potensi konflik yang ada di dalam tubuh bangsa kita. Daerah konflik, rawan konflik, dan pasca konflik perlu terus mendapat perhatian kita semua. Bagi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sudah final yang harus kita jaga keberlanjutannya dengan kehadiran negara yang mampu mengayomi dan melindungi seluruh bangsa dan wilayah tanah air.
- Dalam kerangka itu, kita patut bersyukur bahwa Nota Kesepahaman Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 telah menciptakan titik awal perdamaian di NAD. Kami mengharapkan titik awal tersebut bisa merupakan awal pula bagi penguatan posisi NAD sebagai bagian dari NKRI. Kesepakatan tersebut perlu dilihat sebagai momentum untuk membangun perdamaian sekaligus demokrasi dan kesejahteraan rakyat di Aceh.
- Sama halnya dengan di Provinsi NAD, permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua harus mendapat perhatian kita bersama. Kita berharap permasalahan yang dihadapi saudara-saudara kita di tanah Papua dapat segera terselesaikan. Di antara berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah belum memadainya kesempatan untuk memberdayakan diri secara maksimal sehingga masyarakat Papua belum dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, serta berbagai hal lainnya dalam rangka otonomi khusus.
- Terlepas dari beragamnya pendapat soal latar belakang konflik yang terjadi di tanah air, namun satu hal yang pasti seluruh masyarakat selalu menginginkan ketenangan, kedamaian, persaudaraan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Masyarakat tidak ingin terus hidup dalam tekanan. Kita semua membutuhkan ketenteraman dan keamanan untuk menata kehidupan dan menatap masa depan. Harapan itu hanya dapat diwujudkan bila disertai komitmen semua komponen bangsa dan kehadiran negara yang betul-betul dapat mengayomi seluruh masyarakat.

Apa tanda Indonesia besar, kebersamaan menjadi dasar.

Apa tanda Indonesia kuat, dikeyakinan selalu taat.

Apa tanda Indonesia jaya, jadikan negeri kaya raya.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Hadirin yang terhormat,

- Demikian pengantar kami dalam Sidang Paripurna ini.
- Selanjutnya kami persilakan Saudara Presiden untuk menyampaikan Pidato tentang Pembangunan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

PIDATO PRESIDEN

- Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden yang telah menyampaikan rencana pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.
- Pidato yang disampaikan Saudara Presiden merupakan bahan berharga bagi DPD dalam memberikan pertimbangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diamanatkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945.
- Hakekat dari keberadaan Saudara Presiden di tengah-tengah para Anggota DPD, Gubernur, Bupati, Walikota, dan wakil-wakil rakyat di daerah adalah bahwa masyarakat diajak serta dan dirangsang untuk ikut memikirkan dan mengatasi masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Dalam masyarakat yang makin maju dan makin modern, rakyat tidak puas dengan hanya mendengar dan melaksanakan petunjuk, tetapi ingin turut menentukan nasibnya sendiri. Pada gilirannya sinergi yang dihasilkan oleh kehidupan masyarakat yang didorong oleh otonomi dan desentralisasi, akan mempercepat proses pertumbuhan di daerah dan mempercepat terwujudnya sasaran-sasaran yang kita kehendaki dalam proses mencapai tujuan nasional. Dengan perkataan lain, kita ingin menghindari **politik tarik tambang**, yaitu adu kepentingan antara pusat dan daerah, tetapi harus menerapkan **politik dorong gelombang**, yaitu bagaimana pembangunan nasional dan kemandirian bangsa didasarkan atas dan saling mendorong dengan kemajuan dan kemandirian daerah.

Sidang Dewan Perwakilan Daerah dan Hadirin yang terhormat,

- Sebelum menutup Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah, marilah kita berdoa kehadiran *Allah Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, agar bangsa kita di bawah kepemimpinan Saudara Presiden, diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang begitu berat. Kepada Saudara Drs. H. Abdul Halim Harahap, Anggota DPD dari Sumatera Utara kami persilakan untuk memimpin doa.

PEMBACAAN DOA

- Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Drs. H. Abdul Halim Harahap yang telah memimpin doa. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini.
- Demikianlah rangkaian acara Sidang Paripurna telah kita laksanakan secara khidmat. Akhirnya, dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabbi'l'amin*, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka Mendengarkan Pidato Presiden tentang Pembangunan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006, saya **TUTUP**. *Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*.
